



# RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR TAHUN 2024



**BALI, SEPTEMBER 2023**

**Jl. ANGSOKA No. 8 Denpasar. Telp. (0361)243350**  
<http://www.rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kepada Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat asung kertha wara nugraha-Nya, telah dapat diselesaikan Rencana Kerja (Renja) Awal Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Sistem Kesehatan Nasional. Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024 yang berisikan perencanaan Rumah Sakit Mata dalam periode 2024 berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan sebelumnya dan dinamika perubahan perencanaan pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024, telah dipaparkan pada tanggal 9 Februari 2023. Dengan berakhirnya RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Pemprov Bali telah menyusun RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD ini wajib dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahunnya dan sebagai arahan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahunan pada Renja Perangkat Daerah. "Jadi RPD ini tidak lagi mengacu kepada visi-misi kepala daerah. RPD ini mengacu kepada RPJPD dan RPJPN, termasuk RPJMN yang sudah berlaku yang sifatnya teknokratik,"

Dokumen Renja Akhir Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024 diharapkan menjadi acuan resmi bagi penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2024 sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana Kerja Anggaran.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran, masukan dan juga pendapat sehingga dokumen Renja Tahun 2024 ini dapat kami susun.

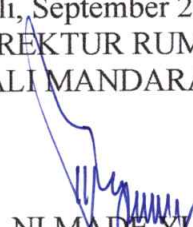
PARAF HIRARKI	
Wadir ASD	
Kabag Perencanaan dan Pengembangan	

Bali, September 2023  
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
BALI MANDARA,

Dr. NI MADE YUNITI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610810 198803 2004

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran, masukan dan juga pendapat sehingga dokumen Renja Tahun 2024 ini dapat kami susun.

Bali, September 2023  
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
BALI MANDARA,



Dr. NI MADE YUNITI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610810 198803 2004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 .....	8
A. Renja dan Capaian Renstra Tahun 2022 .....	8
B. Renja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....	10
C. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	14
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	17
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	17
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	18
C. Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	21
BAB V PENUTUP .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja seharusnya disusun berdasarkan RENSTRA Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali serta masukan dan aspirasi pemangku kepentingan maupun dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan RENJA pembangunan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2022. Oleh karena saat ini Renstra Rumah Sakit Mata Bali Mandara 2024-2026 belum disusun maka Renja disusun dengan memperhatikan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Bali tahun 2024

RENJA memuat kondisi dan permasalahan sebagai pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Dana indikatif serta Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

### **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/1328/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Mata Bali Mandara sebagai Rumah Sakit Khusus Klasifikasi A;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Mata di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).
30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 60);

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **A. Maksud:**

Renja RS Mata Bali Mandara tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Program dan Kegiatan dilingkup RS Mata Bali Mandara dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan.

### **B. Tujuan :**

Penyusunan Renja RS Mata Bali Mandara tahun 2024 bertujuan :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan RS Mata Bali Mandara Tahun 2024
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh RS Mata Bali Mandara Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Renja Akhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang  
Landasan Hukum  
Maksud dan Tujuan  
Sistematika Penulisan

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian  
Renstra Perangkat Daerah 2022, serta Renja Tahun 2023  
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### A. Renja dan Capaian Renstra Tahun 2022

Penyusunan Program dan Kegiatan di tahun 2022 dan 2023 didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta Permendagri 90 tahun 2019 dimana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dipetakan sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali, bertanggung jawab pada urusan Wajib bidang Kesehatan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Terdapat 1 Program dan 2 Kegiatan serta Sub Kegiatan di tahun 2022 pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang mendukung terlaksananya urusan Wajib bidang Kesehatan (Tabel 1). Jumlah Total anggaran yang dikelola di Tahun 2022 oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah Rp63.645.197.972 dimana Rp801.172.832 adalah bersumber dari APBD. Realisasi belanja di tahun 2022 adalah Rp 60.893.647.856 yaitu 95.63% dari rencana anggaran belanja.

**Tabel 1**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Belanja dan Realisasi Keuangan serta Kinerja Tahun 2022**

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Keu	Kinerja	Keu	Kinerja
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	801.172.832	81 nilai	794.128.832 (99.12)	87.78 (nilai 2021)
	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan rumah sakit	62.844.025.040	81 nilai	60.099.519.024 (95.63)	86.18 (rata rata nilai)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai SPO	801.172.832	100%	794.128.832 (99.12)	100%

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Keu	Kinerja	Keu	Kinerja
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	801.172.832	100 %	794.128.832 (99.12%)	100%
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara</b>	<b>62.844.025.040</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>60.099.519.024</b>	<b>85.96 nilai</b>
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	62.844.025.040	100%	60.099.519.024	100%

Pada tahun 2022 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah menetapkan empat Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 (Tabel 2)

**Tabel 2**  
**Target Indikator kinerja utama RS Mata Bali Mandara Tahun 2022**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Target	Capaian
Meningkatnya Mutu Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Total Dan Nilai Persepsi Per Unsur : Total Unsur Yang Terisi) X Nilai Penimbang)	81	85.96
	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	(Jumlah Indikator SPM Yang Dapat Dicapai : Jumlah Seluruh Indikator) X 100%	100%	100%
Menurunnya rujukan oleh rumah sakit mata bali mandara provinsi bali	Persentase Rujukan Oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	(Jumlah Seluruh Rujukan Penuh Rumah Sakit : Jumlah Kunjungan Rumah Sakit) X 100%	≤ 1%	0.14%
Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan	Cost Recovery Rate	(Jumlah pendapatan BLUD : belanja operasional BLUD) X 100%	100%	123.9%

## B. Renja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

**Tabel 3**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target Tahun 2023**  
**Rumah Sakit Mata Bali Mandara**

No	Program (Indikator)	Kegiatan (Indikator)	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit : Target: Nilai indeks 81)	Peningkatan Pelayanan BLUD (Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara Target : Nilai indeks 81)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Target: 1 unit kerja)

**Tabel 4**  
**Target Indikator Kinerja Utama RS Mata Bali Mandara Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Mutu Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	Indeks kepuasan Masyarakat	81
	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%
Menurunnya Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	Persentase rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	≤1%
Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan	Cost Recovery Rate	100%

## C. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 indikator menurunnya rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara tidak dapat terpenuhi. Situasi Pandemi covid 19 menyebabkan tidak adanya kunjungan dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara oleh karena pertimbangan pengurangan mobilitas pemberi layanan, untuk dapat menurunkan risiko penyebaran Covid-19 antar institusi, dimana situasi ini dapat diperbaiki di tahun 2021 (Tabel 5).

Dengan adanya pengalaman dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* dan dengan telah dilakukannya vaksinasi maka tahun 2021 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah dapat meningkatkan kinerja pelayanan untuk dapat memberikan layanan kesehatan mata bagi masyarakat bali dan sekitarnya. Pada tahun 2022 meningkatnya layanan rumah sakit dengan indikator jumlah pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara, tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja, oleh karena besarnya jumlah kunjungan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal baik itu kebijakan pemerintah, kebijakan dari penyelenggara JKN termasuk juga terjadinya *force major* seperti *Covid-19*.

Dari segi kinerja keuangan dalam 4 tahun terakhir terdapat trend peningkatan target pendapatan. Pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2022, akan tetapi bila dilihat dari aspek rasio target dan realisasi maka tahun 2019 memiliki rasio paling tinggi (Tabel 6).

Dalam rentang 2018 – 2022, di tahun 2022 rasio realisasi belanja operasional dari seluruh realisasi belanja adalah 93.29% yang merupakan rasio tertinggi dalam 5 tahun terakhir (Gambar 1). Pada tahun 2021 jumlah dana transfer Dana Alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah Rp2.000.000.000,00 jumlah terkecil dari 4 tahun terakhir dengan proporsi belanja 31.60% dari total belanja investasi. Terdapat trend penurunan dukungan DAK untuk investasi dari tahun 2018 -2022, dan tampak pula adanya penurunan proporsi investasi bersumber DAK dalam belanja investasi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara tahun 2018 -2022 (Tabel 7)

**Tabel 5**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama per 31 Desember tahun 2018 – 2021**  
**Rumah Sakit Mata Bali Mandara**

No	Sasaran	Indikator Kerja	Target Kinerja Pada Tahun				Realisasi Kinerja Pada Tahun			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat				81				82,33
		Persentase kepuasan masyarakat	85%	81%	95%		94,97%	100%	90,85%	
2	Meningkatnya layanan rumah sakit	Jumlah pelayanan Kesehatan pada RS Mata Bali Mandara	54.125 orang	54.400 orang	27.686 orang	34.025 orang	55.547 orang	55.610 orang	29.519 orang	36.105 orang
3	Menurunnya rujukan oleh RS Mata Bali Mandara	Persentase rujukan oleh RS Mata Bali Mandara				≤1%				0,36%
		Persentase rujukan yang tertangani	90%	95%	99%		92,42%	99,74%	98,24%	
4	Tercapainya standar pelayanan minimal RS	Persentase pencapaian SPM	100%	80%	95%	95%	100%	98,61%	100%	98,57%
5	Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan	<i>Cost recovery rate</i>	100%	100%	100%	100%	142%	147,13%	143,39%	128,78%

**Tabel 6**  
**Target dan realisasi pendapatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2019 – 2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2019	40,629,714,280	56,299,222,027.82	138.57
2020	45,000,000,000	54,026,481,997.56	120.06
2021	53.000.000.000	56.771.178.866,41	107,12
2022	65.000.000.000	69.406.362.233,71	106,78



**Gambar 1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Investasi**  
**Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2018 – 2022**

**Tabel 7**  
**Besaran investasi bersumber dana BLUD dan DAK serta proporsi anggaran DAK dari Total Pagu Investasi di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2018 - 2022**

TAHUN	INVESTASI BLUD		INVESTASI DAK		TOTAL PAGU INVESTASI		PROPORSI DAK
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(3:7)
2018	3.088.673.500	2.907.130.093	9.277.150.000	8.305.207.000	12.365.823.500	11.212.337.093	74,07%
2019	3.848.899.548	2.929.911.348	5.937.499.000	5.800.245.090,43	9.786.398.548,00	8.730.156.438,43	66,44%
2020	6.687.949.406	6.634.783.906	7.862.517.455	6.865.428.444,00	14.550.466.861,00	13.500.212.350,00	50,85%
2021	4.345.853.215	4.214.169.013	2.000.000.000	1.946.820.000	6.345.853.215	6.160.989.013	31,60%
2022	4.205.095.000	4.081.097.924	0	0	4.205.095.000	4.081.097.924	0,00%

#### **D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pemerintah Indonesia telah merancang e-kesehatan yang merupakan suatu konsep menyeluruh meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi, serta evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang kesehatan secara nasional. Konsep e-kesehatan adalah memadukan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan proses kerja yang efisien dan efektif. Visi dari e-kesehatan yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkualitas.

Adanya Pandemi Covid-19 merupakan salah satu pendorong dikembangkannya e-kesehatan health informatics (informatika kesehatan) dan tele-health (upaya kesehatan jarak jauh). Teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan Kesehatan di Indonesia dan telah dikembangkan e-planning, e-budgeting dan e-monev. Dalam hal penyediaan data kesehatan, sistem yang dikembangkan juga sudah beragam, seperti SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu), KOMDAT (Komunikasi Data), SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS), e-Sismal (Sistem Informasi Surveilans Malaria), dan sistem PIS-PIK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga). Untuk dapat menghasilkan data yang reliabel dan valid diperlukan system yang terintegrasi. Saat ini integrasi data SIK (Sistem Informasi Kesehatan) dengan data JKN serta pemanfaatan data Pelayanan BPJS Kesehatan merupakan salah satu prioritas pengembangan layanan Kesehatan. Selain itu Pengembangan SISROUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi) bertujuan untuk meningkatkan sistem rujukan antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Dengan memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Republik Indonesia, Dinas Kesehatan dan berdasarkan Analisa situasi yang dilakukan dengan metoda SWOT pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara maka dapat diidentifikasi dua isu strategis yang harus menjadi perhatian dan juga untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan sasaran dan tujuan rumah sakit yaitu : (1) Diperlukannya peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit, (2) Pentingnya Digitalisasi Pelayanan Kesehatan, (3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 telah diidentifikasi Program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator dalam program dan kegiatan tahun 2022 belum mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu dalam penyusunan Renja tahun 2023 diperlukan penyesuaian dan review terhadap indikator pada Program dan Kegiatan tahun 2022

#### **E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Target Program sebagaimana yang tercantum pada RPJMD khususnya pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan (sesuai Permendagri 90 tahun 2019) dengan indikator (Persentase Peningkatan Pasien yang dilayani UPTD. Rumah Sakit Mata Bali Mandara) tidak dapat dipenuhi di tahun 2022 dan telah di review. Peningkatan pasien yang dilayani sangat dipengaruhi faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Telah dilakukan review terhadap indikator kinerja khususnya indikator kinerja utama di Tahun 2023 yang menggambarkan kegiatan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. dipilih Indikator Kinerja Rumah Saki Mata Bali Mandara yang merupakan luaran akhir dari semua proses program dan kegiatan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang merupakan suatu luaran yang sebagian besar ditimbulkan oleh karena usaha internal rumah sakit dan sangat sedikit dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dimana Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2023 ada 4 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Persentase rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan *Cost Recovery Rate*.

Pada tahun 2024 program dan kegiatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara tidak berbeda dengan program dan kegiatan tahun 2023. Pelaksanaan Pelayanan Komunitas yang merupakan

salah satu kegiatan pendekatan layanan ke masyarakat yang merupakan bagian dari Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD direncanakan akan diperluas dengan meningkatkan populasi target sasarannya di tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian beberapa prosedur untuk tetap dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di masa pandemi. Rumah Sakit Mata Bali Mandara merencanakan akan memulai proses akreditasi internasional di tahun 2024, dan telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan proses akreditasi tersebut. Pengembangan layanan rumah sakit merupakan aktivitas yang harus dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan cakupan layanan dan juga pendapatan rumah sakit. Arah pengembangan Rumah Sakit di tahun 2024 tidak akan jauh dari rencana pengembangan di tahun 2023. Dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan pola pengelolaan BLUD, Rumah Sakit Mata Bali Mandara dapat melakukan rasionalisasi anggaran setiap saat, jika terdapat hal hal yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan urgent sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Perencanaan di RS Mata Bali Mandara telah memperhatikan dan menerapkan penguatan pengarusutamaan gender yang telah diidentifikasi dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) (Lampiran 1) serta telah menerapkan pernyataan anggaran dengan menyusun *Gender Budget Statement* (Lampiran 2) khususnya pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah RPJMN. Penyusunan Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.. Rencana Kerja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan ini dapat dicapai melalui lima strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 yaitu:

1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan
2. Pemberdayaan masyarakat dan daerah
3. Pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
5. Penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan operasional yaitu Pembangunan kesehatan difokuskan pada empat area prioritas, antara lain:

1. Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
2. Perbaikan gizi masyarakat khususnya pengendalian prevalensi balita pendek (stunting)
3. Pengendalian penyakit menular khususnya tuberculosa, malaria dan HIV-AIDS
4. Peningkatan jangkauan sasaran terutama pada keluarga tanpa mengabaikan pendekatan-pendekatan lain seperti UKBM, UKS, UKK, posbindu.

Prioritas perencanaan penganggaran diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kegiatan promotif dan preventif. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

### **A. Tujuan**

Tujuan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan penjabaran dari pelaksanaan tujuan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali setiap tahunnya, yang tentu saja berpedoman kepada visi dan misi RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2024. Tahun ini merupakan awal dari pemerintahan provinsi yang baru yang belum disahkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kepala daerah. Sehingga tujuan dan sasaran dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali masih berpedoman kepada isu-isu strategis bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bali dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya tata kelola kinerja perangkat daerah;
- 2) Meningkatnya akses dan status kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2018-2023 menterjemahkan tujuan RPJMD diatas dengan “Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Penduduk” dengan sasaran:

- 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan
- 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- 3) Menurunnya penyakit menular
- 4) Menurunnya penyakit tidak menular
- 5) Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Kesehatan
- 6) Meningkatnya Kualitas pelayanan kesehatan yang berkelanjutan

Untuk dapat mendukung tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali, maka dalam Renstra Perubahan Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Mata Bali Mandara 2018-2023 yang mengacu pada Perubahan RPJMD serta Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Adapun tujuan dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah :

“Tersedianya Pelayanan Kesehatan Mata Yang Unggul ”

dengan sasaran:

- 1) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
- 2) Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik
- 3) Meningkatkan Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit

### C. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sejak tahun 2020 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah menggunakan pendapatan BLUD untuk membiayai belanja operasional dan non operasional rumah sakit. Belanja gaji dan tunjangan ASN masih didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan juga Dana Alokasi Umum untuk dapat melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan (Tabel 8).

Sesuai dengan Permendagri no 79 tahun 2018 maka Rencana Belanja Anggaran BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan satu kesatuan dengan Rencana Kegiatan Anggaran yang dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan satu output dan berdasarkan jenis belanja. Dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara berpedoman pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terdapat satu Program di tahun 2024 yaitu "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi" (Tabel 8) :

**Tabel 8**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan indikator Tahun 2024**

No	Program ( <i>Indikator</i> )	Kegiatan ( <i>Indikator</i> )	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ( <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit : Target: Nilai indeks 81,5</i> )	Peningkatan Pelayanan BLUD ( <i>Persentase pasien yang dilayani tuntas Target : 99%</i> )	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan ( <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Target: 1 unit kerja</i> )
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ( <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Nilai indeks 88,5</i> )	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ( <i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Target: 1 Laporan</i> )	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan ( <i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan Target : 3 unit</i> )

dengan sasaran:

- 1) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
- 2) Menguatnya Manajemen Pelayanan Spesialistik
- 3) Meningkatkan Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit

### C. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sejak tahun 2020 Rumah Sakit Mata Bali Mandara telah menggunakan pendapatan BLUD untuk membiayai belanja operasional dan non operasional rumah sakit. Belanja gaji dan tunjangan ASN masih didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara mendapatkan Dana Alokasi Khusus dan juga Dana Alokasi Umum untuk dapat melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan (Tabel 8).

Sesuai dengan Permendagri no 79 tahun 2018 maka Rencana Belanja Anggaran BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan satu kesatuan dengan Rencana Kegiatan Anggaran yang dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan satu output dan berdasarkan jenis belanja. Dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara berpedoman pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terdapat satu Program di tahun 2024 yaitu "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi" (Tabel 8) :

**Tabel 8**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan indikator Tahun 2024**

No	Program ( <i>Indikator</i> )	Kegiatan ( <i>Indikator</i> )	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ( <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit : Target: Nilai indeks 81.5</i> )	Peningkatan Pelayanan BLUD ( <i>Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara Target : Nilai indeks 81.5</i> )	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan ( <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Target: 1 unit kerja</i> )
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat ( <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan) Nilai indeks 88,5</i> )	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi ( <i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan) Target: 1 Laporan</i> )	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan ( <i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan) Target : 3 unit</i> )

Pengalaman menghadapi bencana *Covid 19* pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan adanya optimisme di tahun 2023 paska vaksinasi, Rumah Sakit Mata Bali Mandara menargetkan peningkatan layanan baik dari layanan unggulan maupun dari layanan baru. Seperti halnya tahun sebelumnya indikator kerja utama di tahun 2024 lebih ditekankan pada peningkatan mutu dan perbaikan pada manajemen layanan spesialistik, dengan kata lain mengurangi rujukan layanan ke fasilitas lain. Diharapkan di tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara tetap bisa mempertahankan mutu pelayanan yang baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat 81.5 dan dapat melayani lebih dari 99% pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Tugas dan Fungsi Rumah sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali

Sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Bali, Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas :

Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dimana Rumah Sakit Mata Bali Mandara mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
- c. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan mata;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik;
- e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- f. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata;
- i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan mata; dan
- j. penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

Untuk dapat mendukung tugas dan fungsinya telah disusun rencana kerja dengan total rencana Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Mata Bali Mandara di tahun 2024 adalah Rp 84.425.000.000.00 yang terdiri dari pendapatan bersumber dari BLUD (Rp80.000.000.000), pendapatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rp1.425.000.000) dan pendapatan

bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp3.000.000.000). Besaran pendapatan layanan BLUD tersebut terdiri dari pendapatan layanan (Rp79.734.000.000,00), hasil kerjasama (Rp 16.000.000,00) dan lain lain pendapatan BLUD yang sah (Rp250.000.000,00).

**Tabel 9.**  
**Rencana Target Pendapatan RS Mata Bali Mandara Tahun 2024**

1								2		4	
01.	02.	01	08	4.	1.	4.	18	<b>Lain-lain Pendapatan Pengelolaan BLUD</b>		<b>80.000.000.000</b>	
01.	02.	01	08	4.	1.	4.	18	<b>Pendapatan Pengelolaan BLUD dr Layanan Kesehatan</b>		<b>79.734.000.000</b>	
								Rawat jalan		38.000.000.000	
								Operasi dan rawat inap		30.000.000.000	
								Obat		11.719.000.000	
								Magang orientasi / Penelitian dokter		15.000.000	
01.	02.	01	08	4.	1.	4.	18	<b>Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain</b>		<b>16.000.000</b>	
								Sewa Kantin		12.000.000	
								Penerimaan Lahan Parkir		4.000.000	
01.	02.	01	08	4.	1.	4.	18	<b>Pendapatan lain-lain</b>		<b>250.000.000</b>	
								Jasa Giro		150.000.000	
								Penerimaan AFI Deposito		100.000.000	

Pada tahun 2024, total anggaran belanja Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah Rp80.000.000.000,00. (delapan puluh milyar rupiah) bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10. Belanja tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (lampiran 3)

**Tabel 10.**  
**Jenis Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana tahun 2024**

Program ( <i>Indikator</i> )	Kegiatan ( <i>Indikator</i> )	Sub Kegiatan
<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</b>
<i>(Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit</i>	<i>Persentase pasien yang dilayani tuntas</i>	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
81.5	≥99%	1
Rp. 80.000.000.000,00	Rp80.000.000.000,00	Rp80.000.000.000,00

<b>Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan</b>
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan</i>	<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan</i>
88.5	1 laporan	3 Unit
Rp.4.425.000.000,00	Rp.4.425.000.000,00	Rp.4.425.000.000,00

**Tabel 11.**  
**Program dan Kegiatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pembangunan Tahun 2024**

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah PRA-RKA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 Provinsi Bali

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program (2024)			Sasaran Kegiatan (2024)						Lokasi Kegiatan	RENCANA Kebutuhan Anggaran 2024					
		Indikator Kinerja (RPJMD)	Target 2024	Defisini Operasional (DO ) Capaian Program	Output Sub Kegiatan	Target 2024	DO Output Sub Kegiatan	Outcome (hasil) / keluaran Kegiatan	Target 2024	DO Outcome/ keluaran Kegiatan							
1	2	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							80.000.000.000					
1	2	1	1	10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>							80.000.000.000					
1	2	1	1	10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	81.5 Nilai	Nilai rata rata indeks Kepuasan masyarakat dari 3 rumah sakit Provinsi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 unit kerja	Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	81.5 Nilai	Jumlah pasien yang dilayani tuntas (tidak dirujuk penuh) dibagi seluruh pasien yang dilayani	Kota Denpasar	
													Persentase Pasien yang dilayani tuntas	99%			
<b>TOTAL</b>																80.000.000.000	

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah PRA-RKA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 Provinsi Bali

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara, Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (2024)			Sasaran Kegiatan (2024)						Lokasi Kegiatan	RENCANA Kebutuhan Anggaran 2024					
		Indikator Kinerja (RPJMD)	Target 2024	Defisini Operasional (DO ) Capaian Program	Output Sub Kegiatan	Target 2024	DO Output Sub Kegiatan	Outcome (hasil) / keluaran Kegiatan	Target 2024	DO Outcome/ keluaran Kegiatan							
1	2	1			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							4.425.000.000					
1	2	1	1	10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							4.425.000.000					
1	2	1	1	10	1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88.5 Nilai	Nilai rata rata indeks Kepuasan masyarakat dari dari seluruh instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan program Pengadaan alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	3 unit	Jumlah unit Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Persentase Rujukan oleh rumah sakit Mata Bali Mandara	≤ 1%	Jumlah Pasien yang dirujuk penuh dibagi jumlah seluruh pasien yang dilayani	Kota Denpasar	
													Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan		
TOTAL																4.425.000.000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Pemerintah Provinsi Bali, keberadaan Renja Rumah Sakit Mata Bali Mandara diintegrasikan dengan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali, untuk kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra-RKA) dan selanjutnya RKA. Pelaksanaan Program Pembangunan seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali tahun 2024 memerlukan dukungan dari semua pihak baik internal rumah sakit, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, masyarakat, termasuk juga DPRD dan swasta. Dukungan tersebut sangat penting artinya agar sasaran serta indikator kinerja yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Rumah Sakit Mata Bali Mandara Tahun 2024. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam rencana kerja ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan target sasaran yang telah ditetapkan serta berprinsip pada asas efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya.

#### **5.1. Kesimpulan**

Rencana Kerja tahun 2024 Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp 84.425.000.000,00 (Delapan puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan jumlah target pendapatan yang sama yaitu sebesar Rp 84.425.000.000,00 (Delapan puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dapat mendukung Program:

1. Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi, dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Nama Kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b>                      Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p><b>Kegiatan :</b>                      Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b>                      Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</p>	<p>RS Mata Bali Mandara dalam melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD didukung oleh berbagai sumber daya termasuk didalamnya sumber daya aparatur. Pada awal tahun 2022 jumlah sumber daya aparatur pada RS Mata Bali Mandara berjumlah 276 orang, dengan rincian sbb :</p> <p>1. ASN : 181 orang                      - Laki-Laki : 44 orang                      - Perempuan : 137 orang</p> <p>2. Tenaga Non ASN : 95 orang                      - Laki-Laki : 55 orang                      - Perempuan : 40 orang</p> <p>Dari seluruh total sumber daya aparatur, secara spesifik diuraikan sebagai berikut :</p> <p>A. Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>1. Pejabat Pimpinan Tinggi : 1 orang                      - Laki-Laki : -                      - Perempuan : 1 orang</p> <p>2. Pejabat Administrator : 8 orang                      - Laki-Laki : 2 orang                      - Perempuan : 6 orang</p> <p>3. Pejabat Fungsional / Sub Koordinator Unit Substansi : 13 orang                      - Laki-Laki : 4 orang                      - Perempuan : 9 orang</p> <p>4. Pelaksana : 32 orang                      - Laki-Laki : 10 orang                      - Perempuan : 22 orang</p> <p>5. Tenaga Kesehatan (Dokter dan Perawat) : 32 orang                      - Laki-Laki : 10 orang                      - Perempuan : 22 orang</p> <p>6. Apoteker dan Asisten Apoteker : 9 orang                      - Laki-Laki : -                      - Perempuan : 9 orang</p>	<p><b>Akses :</b>                      Seluruh jenis jabatan pada prinsipnya terbuka untuk laki-laki dan perempuan, namun memang terdapat beberapa jenis jabatan yang saat ini didominasi hanya oleh laki-laki saja seperti Refraksionis, Tenaga Elektromedis dan non medis, Sopi, Pengamanan dan Tenaga Teknologi Informasi, serta beberapa jabatan yang hanya diisi oleh perempuan seperti Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisionis, Adminkes dan Pranata Lab Kes</p> <p><b>Partisipasi :</b>                      Secara umum segala bentuk pelaksanaan kegiatan dalam segala lini jabatan telah melibatkan seluruh aspek secara adil, baik perempuan ataupun laki-laki. Kesempatan untuk mengembangkan kapasitas SDM termasuk dalam hal-hal peningkatan kompetensi, kesempatan memberikan masukan dalam pengambilan keputusan tidak dibedakan berdasarkan gender.</p> <p><b>Kontrol :</b>                      Segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya yang ada di unit instansi termasuk sarana prasarana dapat dimanfaatkan oleh laki-laki ataupun perempuan.</p>	<p>Jabatan-jabatan yang didominasi oleh laki-laki merupakan jabatan dengan tugas yang tinggi resiko serta membutuhkan kesiagapan dan kekuatan fisik.</p> <p>Jabatan-jabatan yang didominasi oleh perempuan merupakan jabatan dengan tugas yang membutuhkan keluwesan serta keterampilan dalam penyampaian informasi kepada penerima pelayanan</p> <p>Masih kurang tersosialisasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi.</p>	<p>Rendahnya minat sumber daya aparatur untuk mengisi jabatan-jabatan yang hanya didominasi oleh gender tertentu dikarenakan stigma yang terbangun di masyarakat serta citra jabatan yang biasanya hanya diisi oleh sumber daya aparatur dengan gender tertentu</p> <p>Masih kurang tersosialisasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi kepada masyarakat.</p>	<p>Penyampaian informasi secara aktif terkait isu-isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi.</p> <p>Memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan kapasitas SDM baik kepada pegawai laki-laki atau perempuan terkait jabatan-jabatan yang hanya didominasi oleh gender tertentu</p>	<p>Sosialisasi dan implementasi terkait isu-isu penguatan gender dalam pelaksanaan tugas di unit kerja</p> <p>Melakukan koordinasi dengan instansi pembina kepegawaian di daerah/BKPSDM dalam hal penempatan dan pengisian pegawai untuk dapat memperhatikan isu gender.</p>	<p>RS Mata Bali Mandara dalam melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD didukung oleh berbagai sumber daya termasuk didalamnya sumber daya aparatur. Pada Tahun 2022 jumlah sumber daya aparatur pada RS Mata Bali Mandara berjumlah 276 orang, dengan rincian sbb :</p> <p>1. ASN : 181 orang                      - Laki-Laki : 44 orang                      - Perempuan : 137 orang</p> <p>2. Tenaga Non ASN : 95 orang                      - Laki-Laki : 55 orang                      - Perempuan : 40 orang</p> <p>Dari seluruh total sumber daya aparatur, secara spesifik diuraikan sebagai berikut :</p> <p>A. Aparatur Sipil Negara (ASN)</p> <p>1. Pejabat Pimpinan Tinggi : 1 orang                      - Laki-Laki : -                      - Perempuan : 1 orang</p> <p>2. Pejabat Administrator : 8 orang                      - Laki-Laki : 2 orang                      - Perempuan : 6 orang</p> <p>3. Pejabat Fungsional / Sub Koordinator Unit Substansi : 13 orang                      - Laki-Laki : 4 orang                      - Perempuan : 9 orang</p> <p>4. Pelaksana : 32 orang                      - Laki-Laki : 10 orang                      - Perempuan : 22 orang</p> <p>5. Tenaga Kesehatan (Dokter dan Perawat) : 32 orang                      - Laki-Laki : 10 orang                      - Perempuan : 22 orang</p> <p>6. Apoteker dan Asisten Apoteker : 9 orang                      - Laki-Laki : -                      - Perempuan : 9 orang</p>	<p><b>Indikator Kinerja Program :</b>                      Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di BLUD</p> <p><b>Target Kinerja Program (Capaian Program):</b>                      81,5 Nilai</p> <p><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>                      Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara</p> <p><b>Target Kegiatan :</b>                      81,5 Nilai</p> <p><b>Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output) :</b>                      Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD</p> <p><b>Target Sub Kegiatan :</b>                      1 Unit Kerja</p>

Nama Kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		<u>Manfaat :</u> Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di unit instansi memberikan manfaat yang sama dan merata baik kepada perempuan ataupun laki-laki						
	7. Elektromedis : 3 orang - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : -						7. Elektromedis : 3 orang - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : -	
	8. Adminkes, Pranata Lab Kes : 3 orang - Laki-Laki : - - Perempuan : 3 orang						8. Adminkes, Pranata Lab Kes : 3 orang - Laki-Laki : - - Perempuan : 3 orang	
	9. Nutrisionis : 2 orang - Laki-Laki : - - Perempuan : 2 orang						9. Nutrisionis : 2 orang - Laki-Laki : - - Perempuan : 2 orang	
	10. Refraksionis : 4 orang - Laki-Laki : 4 orang - Perempuan : -						10. Refraksionis : 4 orang - Laki-Laki : 4 orang - Perempuan : -	
	11. Tenaga Pendukung Kesehatan : 9 orang - Laki-Laki : 2 orang - Perempuan : 7 orang						11. Tenaga Pendukung Kesehatan : 9 orang - Laki-Laki : 2 orang - Perempuan : 7 orang	
	<b>B. Tenaga Non ASN</b>						<b>B. Tenaga Non ASN</b>	
	1. Tenaga Kesehatan : 42 orang - Laki-Laki : 20 orang - Perempuan : 22 orang						1. Tenaga Kesehatan : 42 orang - Laki-Laki : 20 orang - Perempuan : 22 orang	
	2. Administrasi : 19 orang - Laki-Laki : 10 orang - Perempuan : 9 orang						2. Administrasi : 19 orang - Laki-Laki : 10 orang - Perempuan : 9 orang	
	3. Tenaga IT : 3 orang - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : -						3. Tenaga IT : 3 orang - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : -	
	4. Pengamanan Kantor : 7 orang - Laki-Laki : 7 orang - Perempuan : -						4. Pengamanan Kantor : 7 orang - Laki-Laki : 7 orang - Perempuan : -	
	5. Teknisi Elektro Non Medis : 3 orang - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : -						5. Teknisi Elektro Non Medis : 3 orang - Laki-Laki : 3 orang - Perempuan : -	
	6. Kebersihan Kantor : 18 orang - Laki-Laki : 9 orang - Perempuan : 9 orang						6. Kebersihan Kantor : 18 orang - Laki-Laki : 9 orang - Perempuan : 9 orang	
	7. Sopir : 2 orang - Laki-Laki : 2 orang - Perempuan : -						7. Sopir : 2 orang - Laki-Laki : 2 orang - Perempuan : -	
	8. Penata Boga : 1 orang - Laki-Laki : 1 orang - Perempuan : -						8. Penata Boga : 1 orang - Laki-Laki : 1 orang - Perempuan : -	

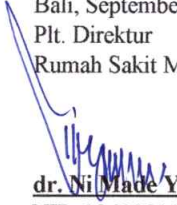
Bali, September 2023  
 Plt. Direktur  
 Rumah Sakit Mata Bali Mandara

  
 dr. Ni Made Yuniti, MM  
 NIP. 19610810 198803 2 004

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER</b> <b>(GENDER BUDGET STATEMENT)</b>													
<b>SKPD</b>	: RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI												
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: 2024												
<b>PROGRAM</b>	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi												
<b>KEGIATAN</b>	1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD												
<b>SUB KEGIATAN</b>	1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b>                      RS Mata Bali Mandara dalam melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD didukung oleh berbagai sumber daya termasuk didalamnya sumber daya aparatur. Pada Tahun 2022 jumlah sumber daya aparatur pada RS Mata Bali Mandara berjumlah 276 orang, dengan rincian sbb :</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. ASN</td> <td>: 181 orang</td> </tr> <tr> <td>- Laki-Laki</td> <td>: 44 orang</td> </tr> <tr> <td>- Perempuan</td> <td>: 137 orang</td> </tr> <tr> <td>2. Tenaga Non ASN</td> <td>: 95 orang</td> </tr> <tr> <td>- Laki-Laki</td> <td>: 55 orang</td> </tr> <tr> <td>- Perempuan</td> <td>: 40 orang</td> </tr> </table> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b>  <b>a. Faktor Kesenjangan</b>  <u>Akses :</u>                      Seluruh jenis jabatan pada prinsipnya terbuka untuk laki-laki dan perempuan, namun memang terdapat beberapa jenis jabatan yang saat ini didominasi hanya oleh laki-laki saja seperti Elektomedis, Tenaga Elektomedis, Sopir, Pengamanan dan Teknisi Elektro Non Medis dan ada pula beberapa jabatan yang hanya diisi oleh perempuan seperti Apoteker, Asisten Apoteker, Nutrisionis, Adminkes dan Pranata Lab Kes</p> <p><u>Partisipasi :</u>                      Secara umum segala bentuk pelaksanaan kegiatan dalam segala lini jabatan telah melibatkan seluruh aspek secara adil, baik perempuan ataupun laki-laki. Kesempatan untuk mengembangkan kapasitas SDM termasuk dalam hal-hal pemberian masukan dalam pengambilan keputusan tidak dibedakan berdasarkan gender.</p> <p><u>Kontrol :</u>                      Segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya yang ada di unit instansi termasuk sarana prasarana dapat dimanfaatkan oleh laki-laki ataupun perempuan.</p> <p><u>Manfaat :</u>                      Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di unit instansi memberikan manfaat yang sama dan merata baik kepada perempuan ataupun laki-laki</p> <p><b>b. Penyebab Internal</b>                      Jabatan-jabatan yang didominasi oleh laki-laki merupakan jabatan dengan tugas yang tinggi resiko serta membutuhkan kesiagapan dan kekuatan fisik.                      Jabatan-jabatan yang didominasi oleh perempuan merupakan jabatan dengan tugas yang membutuhkan keluwesan serta keterampilan dalam penyampaian informasi kepada penerima pelayanan.</p> <p>Masih kurang tersosialisasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi.</p> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b>                      Rendahnya minat sumber daya aparatur untuk mengisi jabatan-jabatan yang hanya didominasi oleh gender tertentu dikarenakan stigma yang terbangun di masyarakat serta citra jabatan yang biasanya hanya diisi oleh sumber daya aparatur dengan gender tertentu.                      Masih kurang tersosialisasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi kepada masyarakat.</p>	1. ASN	: 181 orang	- Laki-Laki	: 44 orang	- Perempuan	: 137 orang	2. Tenaga Non ASN	: 95 orang	- Laki-Laki	: 55 orang	- Perempuan	: 40 orang
1. ASN	: 181 orang												
- Laki-Laki	: 44 orang												
- Perempuan	: 137 orang												
2. Tenaga Non ASN	: 95 orang												
- Laki-Laki	: 55 orang												
- Perempuan	: 40 orang												
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolak Ukur</b>                      Penyampaian informasi secara aktif terkait isu-isu gender dalam pelaksanaan tugas di unit instansi.</p> <p>Memberikan kegiatan pengembangan kapasitas SDM baik kepada pegawai laki-laki atau perempuan terkait jabatan-jabatan yang hanya didominasi oleh gender tertentu.</p>												

	<b>2. Indikator dan Target Kinerja</b>		
	a. Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di BLUD		
	b. Target Kinerja Program (Capaian Program) : 81,5 Nilai		
	c. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pasien Yang Dilayani Tuntas		
	d. Target Kegiatan : ≥99%		
	e. Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output) : Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		
	f. Target Sub Kegiatan : 1 Unit Kerja		
<b>JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN</b>	Rp80.000.000.000,00		
<b>RENCANA AKSI</b>	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Masukan	Rp80.000.000.000,00
		Keluaran	81,5 Nilai
		Hasil	1 Unit Kerja

Bali, September 2023  
 Plt. Direktur  
 Rumah Sakit Mata Bali Mandara

  
dr. Ni Made Yuniti, MM  
 NIP. 19610810 198803 2 004



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024**

Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	:	1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	:	Pendapatan dari BLUD
Lokasi Kegiatan	:	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember 2024
Kelompok Sasaran	:	Masyarakat
Jumlah 2023	:	Rp. 77.359.291.250,00
Jumlah 2024	:	Rp. 80.000.000.000,00
Jumlah 2025	:	Rp. 90.000.000.000,00

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja**

**Indikator**

**Tolak Ukur Kinerja**

Capaian Program	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD
Masukan	:	Dana
Kelua	:	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara
Hasil	:	81.5

**Rincian Belanja Sub Kegiatan**

**Rincian Anggaran Belanja Lansung Menurut Program dan Per Kegiatan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah**

KODE REKONING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		Koefisien	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5	6=3x5
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				80.000.000.000
5	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>				71.874.000.000
5	Belanja Pegawai				
5	Belanja Pegawai BLUD				
5	Belanja Pegawai BLUD				
5	Belanja Pegawai BLUD				
5	[#]Belanja Pegawai BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	tahun	29.052.500.000	29.052.500.000
5	Belanja Barang dan Jasa				
5	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
5	[#]Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	tahun	42.821.500.000	42.821.500.000
5	<b>BELANJA MODAL</b>				
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
5	[#]Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	1	tahun	8.126.000.000	8.126.000.000

Bali, September 2023  
P.t. Direktur  
Rumah Sakit Mata Bali Mandara

dr. Ni Made Yuniti, MM  
NIP. 19610810 198803 2 004